

» OPINI

Merdeka Belajar dan Bonus Demografi

Keluaran MBKM diharapkan mempersempit gap keterampilan SDM di pasar tenaga kerja baru.

■ Oleh **TAUCHID KOMARA YUDA,**
Ketua Bidang Riset di
Indonesian Council of Youth
Development (ICYD)

Bonus demografi menawarkan peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Meski demikian, tidak sedikit pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk memperoleh manfaat penuh dari tren bonus demografi yang sedang berlangsung.

Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah rendahnya motivasi sumber daya manusia (SDM) kita untuk bersaing. Argumen tersebut didukung oleh berbagai bukti, seperti laporan Indeks Inovasi Global yang menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari 129 negara, tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan, termasuk Singapura, Korea Selatan, dan Cina.

Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang saat ini berada pada peringkat 87 dari 157 negara, semakin memperkeruh iklim persaingan yang telanjur merundung.

Untuk alasan di atas, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi semakin relevan untuk diterapkan, dengan harapan dapat mendorong mahasiswa menjadi pembelajar aktif dan memiliki daya saing tinggi.

Tidak hanya itu, keterhubungan mahasiswa dengan berbagai stakeholder, misalnya, industri, juga bertujuan agar mahasiswa dapat lebih adaptif dengan budaya kolaborasi lintas sektor: sambil mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendorong terciptanya inovasi yang sangat diperlukan untuk meraih peluang industri 4.0 dan 5.0.

Keluaran lain yang diharapkan dari MBKM adalah mempersempit gap keterampilan SDM di pasar tenaga kerja baru yang semakin terspesialisasi dan selektif. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan akan menggantikan

banyak posisi yang memiliki pola kerja yang repetitif.

Namun begitu, posisi-posisi baru dengan kualifikasi keterampilan tertentu, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas mulai bermunculan.

Kendatipun begitu, MBKM, setelah tiga tahun diimplementasikan, ternyata memiliki celah yang membuka masalah yang cukup serius. Sebagaimana telah dipaparkan dalam berbagai kesempatan, tidak jarang ditemukan ketidakjelasan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kurikulum yang dibuat oleh kampus.

Ditambah lagi, masing-masing kampus memiliki prakondisi yang berbeda-beda, mulai dari kualitas, SDM, dan infrastruktur penunjang. Apabila kesenjangan prakondisi ini tidak disempitkan terlebih dahulu, bukan tidak mungkin ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah dan kampus justru semakin melebar.

Dari sisi para pengajar, mengutip Murtiningsih (2023), penerapan MBKM disinyalir telah menimbulkan masalah dangkalnya interdisipliner dalam pengajaran. Sebab, mahasiswa kini diperbolehkan mengambil mata kuliah dari jurusan yang berbeda, misalnya ilmu sosial dan keteknikan, tapi tanpa panduan yang memadai tentang bagaimana mengintegrasikan ilmu yang diperoleh dari berbagai bidang.

Akibatnya, banyak mahasiswa yang akhirnya hanya sekadar memperoleh 'informasi baru' tanpa tahu bagaimana benang merah disiplin keilmuan yang berbeda keilmuan tadi tersambung.

Memang tidak mudah untuk menyelesaikan kompleksitas masalah pendidikan kita dalam sekali gebrakan.

Pekerjaan rumah selanjutnya untuk mengatasi kelemahan MBKM adalah dengan, pertama-tama, meningkatkan kualitas pengajar.

Bukan tanpa alasan kualitas pengajar di Indonesia masih menjadi permasalahan. Banyak pengajar tidak memiliki pelatihan dan keahlian yang diperlukan untuk memberikan pendidikan

berkualitas tinggi.

Untuk itu, pemerintah perlu memberikan pelatihan tambahan dan dukungan bagi pengajar, termasuk menaikkan tingkat gaji dan memberikan insentif lebih bagi pengajar, terutama bagi mereka yang bekerja di daerah terpencil atau perdesaan, sebagaimana yang sudah dipraktikkan di Malaysia.

Selanjutnya mempromosikan interaksi yang lebih dekat antara jenjang pendidikan reguler dan vokasi. Tujuannya agar mahasiswa dapat memperoleh berbagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, baik itu secara teoretis dan praktis, untuk berbagai karier.

Yang tidak kalah penting, pemerintah juga dapat memaksimalkan pendidikan kejuruan dengan menyediakan lebih banyak dana untuk pengembangan inovasi, dan mempromosikan pendidikan kejuruan sebagai jalur karier yang layak. Hanya dengan begitu, disparitas antara pendidikan reguler dan vokasi dalam perolehan peluang di pasar tenaga kerja dapat dipersempit.

Penekanan terakhir, yaitu inklusi literasi digital. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan sumber daya tambahan bagi mahasiswa dan dosen, mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan memperluas akses terhadap sumber daya digital.

Fokus pada inklusi literasi digital ini juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Jika semua ini dapat terlaksana, penulis optimistis bahwa MBKM pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan industri kontemporer, tanpa harus trade-off dengan mengorbankan esensi dari pendidikan itu sendiri.

Konkretnya adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ke dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk menerapkan keterampilan praktis yang telah mereka pelajari pada permasalahan dunia nyata, sekaligus mengembangkan pemikiran kritis dan kreativitas mereka.

Pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa siswa siap menghadapi tuntutan pasar kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan intelektual dan pribadi mereka.

Selain itu, menggabungkan pendidikan etika dan moral dapat

membantu memastikan bahwa individu tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar.

Jenis pendidikan ini dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan perasaan yang kuat tentang benar dan salah serta membuat keputusan yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.